

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah diharapkan memainkan peran yang lebih proaktif dalam menampung kepentingan yang terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi. Peran aktif pemerintah tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas yang diemban, tetapi juga harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara saat ini. Pemerintah harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik secara internal maupun eksternal. Untuk mencapai keselarasan tersebut, pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan pemerintahan. Selain demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kolaborasi ini juga menjadi bentuk respons pemerintah dalam menangani isu-isu publik, termasuk pengelolaan pariwisata, melalui penerapan tata kelola kolaboratif di Indonesia.

Collaborative governance adalah sebuah wadah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Holzer et al (dalam Anriani, 2021), collaborative governance menggambarkan situasi di mana sektor pemerintah dan swasta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan masyarakat. Konsep ini mencerminkan adanya ketergantungan timbal balik serta hubungan yang erat antara kedua pihak. Setelah para aktor berkomitmen dan mulai berkolaborasi, penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan bersama guna memastikan terciptanya proses kolaborasi yang berkualitas.

Mengingat Kabupaten Grobogan sendiri memiliki banyak tempat wisata,

namun belum dapat dimaksimalkan oleh pemerintah Grobogan. Maka dengan ini menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah Grobogan untuk bisa memaksimalkan wisata-wisata yang ada dengan melakukan collaborative. Salah satu destinasi wisata yang saat ini tengah dipromosikan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan Bledug Kuwu. Tempat ini jadi salah tujuan pilihan wisata unggulan yang sangat diminati para wisatawan (Bawole, 2020). Saat ini, desa wisata menjadi magnet bagi wisatawan, baik mancanegara maupun domestik (Sahabudin, 2020), dengan menyajikan produk berupa keindahan alam dan kekayaan budaya (Manteiro, 2016; Rahmatillah, Insyan, Nurafifah, & Hirsan, 2019).

Objek wisata di Kabupaten Grobogan meliputi Goa Lawa atau Goa Macan, Bledug Kuwu, Sendang Coyo, Sendang Keongan, dan Waduk Kedung Ombo. Namun, hanya dua di antaranya yang dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten, yaitu Bledug Kuwu dan Goa Lawa atau Goa Macan. Dalam hal ini pengelolaannya di kelola sendiri oleh pemerintah daerah desa wisata, sehingga ada objek wisata yang kondisinya terawat dan ada objek wisata yang kondisinya tidak terawat bahkan sudah mulai mengalami kerusakan. Dalam penelitian ini berfokus pada wisata Bledug Kuwu. Berdasarkan data dari Dispora Kabupaten Grobogan, jumlah pengunjung di objek wisata Bledug Kuwu mencapai 30.025 orang pada tahun 2019, menurun menjadi 13.600 orang pada tahun 2020, dan 8.859 orang pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 jumlah pengunjung mulai mengalami peningkatan sejumlah 10.973 dan 2023 jumlah pengunjung mencapai 14.762. Adapun objek

wisata Waduk Kedung Ombo, Sendang Coyo, dan Sendang Keongan tidak dikelola oleh pemerintah daerah tetapi di kelola oleh bumdes. Selain itu, objek wisata lain yang dikelola oleh masyarakat atau swasta, tetapi belum dikembangkan sepenuhnya, termasuk Api Abadi Mrapen, Goa Urang, dan Air Terjun Widuri. Objek-objek wisata ini tersebar di beberapa kecamatan seperti Kradenan, Grobogan, Godong, Geyer, Pulokulon, dan Klambu.

Peningkatan sektor wisata kabupaten Grobogan sebenarnya membutuhkan daya dorong yang baik. Daya dorong ini mencakup daya dukung lingkungan, modal kerja, aksesibilitas, sarana-prasana umum, dan sarana fasilitas umum (Harahap & Ritonga, 2020). Sinergi antar daerah juga menjadi aspek penting dalam pengembangan pariwisata (Kominfo RI, 2020). Dalam konteks pengembangan pariwisata di Kabupaten Grobogan, peran pemerintah sangat penting. Pola pengembangan yang diterapkan oleh pemerintah akan memengaruhi kemajuan daerah tersebut. Kabupaten Grobogan sendiri menggunakan pendekatan Collaborative Governance dalam memajukan sektor pariwisatanya.

Ansel dan Gash merumuskan enam kriteria penting dalam kolaborasi, yaitu: (1) forum yang diinisiasi oleh lembaga publik atau pemerintah, (2) peserta dalam forum mencakup aktor non-negara, (3) peserta berperan aktif dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar 'dikonsultasikan' oleh lembaga publik, (4) forum ini diatur secara resmi dan bertemu secara kolektif, (5) tujuan forum adalah mencapai keputusan berdasarkan konsensus (meskipun konsensus tidak selalu tercapai), dan (6) kolaborasi ini berfokus pada kebijakan

publik atau manajemen (Anselin, 2006; Ansell & Gash, 2008; Gash, 2022).



Gambar 1.1 Wisata Bledug Kuwu

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa pada obyek wisata Bledug Kuwu menunjukan muka yang baru dimana tulisan pada obyek wisata tersebut telah di renovasi.



Gambar 1.2 Obyek Wisata Bledug Kuwu

Pada gambar diatas terlihat obyek wisata yang menjadi daya tarik obyek wisata Bledug Kuwu yaitu lumpur yang tidak pernah berhenti bergejolak menyemburkan lumpur panas dan pada wisata tersebut warga local memanfaatkan lumpur tersebut untuk membuat garam yang kemudian dijual

pada kawasan wisata Bledug Kuwu namun sayang para pedagang yang berjualan terlihat tidak tertata yang membuat kesan kumuh pada daerah tersebut.

Peneliti dalam pembuatan skripsi ini mempunyai beberapa pertimbangan karena topik skripsi ini telah ada yang meneliti. Hal itu membuat Peneliti ada landasan dalam membuat skripsi ini jadi lebih terstruktur dan terarah. Hanya saja, peneliti mengambil sisi lain yang belum diteliti oleh peneliti lain serta yang permasalahan yang akan peneliti angkat adalah kolaborasi dalam pengembangan pariwisata Bledug kuwu karena peneliti merasa dalam obyek-obyek wisata tersebut seharusnya bisa dimaksimalkan lagi dan tidak hanya stuck seperti itu karena selama ini obyek tersebut dirasa kurang berkembang seperti apa yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat di atas yang berkaitan dengan penelitian ini menurut pendapat penulis obyek wisata di Kabupaten Grobogan dengan dilakukannya kolaborasi antara pengelola tempat wisata dan pemerintah untuk membangun objek wisata yang ada di Kabupaten Grobogan dengan melengkapi sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pelestarian alam karena sampai saat ini sarana dan prasarana yang ada di obyek wisata setelah dilakukan collaborative governance masih kurang dan perlu ditingkatkan. Beberapa program dan pemanfaatan potensi telah direncanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengembangan obyek wisata di Kabupaten Grobogan dengan collaborative pun juga belum cukup dimaksimalkan dengan baik. Sehingga perlu lagi

dilaksanakan penelitian ulang guna mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi ketika proses collaborative sedang dilaksanakan.

Data tentang jumlah pengunjung juga diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan. Pengembangan pariwisata membutuhkan peran yang seimbang dan koordinasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu metode pengembangan pariwisata adalah pendekatan kolaboratif.

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Obyek Wisata Bledug Kuwu Tahun 2019 – 2023

Jenis Wisata	Nama Daya Tarik Wisata	Jumlah Pengunjung				
		2019	2020	2021	2022	2023
Wisata Alam	Bledug Kuwu	30.025	13.600	8.859	10.973	14.762

Sumber: Data Statistik Pariwisata Jawa Tengah

Berdasarkan Data Statistik Pariwisata Jawa Tengah, yang telah di sajikan bahwa pengunjung objek wisata pada tahun 2019 30.025 kemudian mengalami penurunan jumlah pengunjung di tahun 2020 dan 2021 yang di sebabkan karena adanya virus covid-19, masyarakat di himbau pemerintah untuk PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Kemudian pada tahun 2022 jumlah pengunjung wisata Bledug Kuwu mulai bangkit karena sudah tidak adanya peraturan PPKM.

Hal ini didukung dengan adanya data hasil observasi penulis yaitu: 1) Peran pemerintah daerah dalam mendukung pemulihan pariwisata melalui kebijakan insentif, promosi, dan fasilitasi kemitraan dengan pelaku wisata. 2) Keterlibatan masyarakat lokal dan organisasi non-pemerintah dalam pengembangan wisata Bledug Kuwu. 3) Kerjasama dengan sektor swasta (perhotelan, restoran, transportasi) dalam menyediakan layanan pendukung

pariwisata yang memadai. 4) Upaya kolaboratif dalam membangun citra destinasi wisata yang aman dan menarik bagi wisatawan. 5) Forum atau kelompok kerja yang melibatkan pemangku kepentingan pariwisata (pemerintah, swasta, komunitas) dalam merumuskan strategi pemulihan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. 6) Program pelatihan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha wisata (pemandu, UMKM).

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, *collaborative governance* telah terbukti memberikan manfaat dan keistimewaan, antara lain: 1) Meningkatkan kepercayaan dan legitimasi di antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012). 2) Memfasilitasi pembagian sumber daya, pengetahuan, dan keahlian yang lebih baik di antara para pihak yang berkolaborasi (Bryson et al., 2015; Purdy, 2012). 3) Menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan karena menggabungkan perspektif yang beragam (Innes & Booher, 2010; Purdy, 2012). 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi tantangan kompleks (Emerson & Nabatchi, 2015; Purdy, 2012). 5) Mempromosikan pembangunan modal sosial, kepercayaan, dan jaringan sosial yang lebih kuat di antara para pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012). 6) Menghasilkan kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Emerson & Nabatchi, 2015; Purdy, 2012).

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan *collaborative governance*

pengembangan obyek wisata di Kabupaten Grobogan yang peneliti temui ketika menanyakan hal tersebut kepada petugas pengelola objek wisata seperti:

- 1) Aspek koordinasi dan komunikasi (Kurangnya sosialisasi terkait objek wisata ini menunjukkan adanya kekurangan dalam koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan pariwisata).
- 2) Aspek sumber daya (Keterbatasan anggaran, minimnya penanaman modal, dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung mengindikasikan adanya permasalahan dalam alokasi dan mobilisasi sumber daya (finansial, infrastruktur, dll) untuk pengembangan objek wisata).
- 3) Aspek kelembagaan (Masih rendahnya kelompok sadar wisata menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan seperti organisasi masyarakat belum maksimal dilibatkan dalam pengelolaan pariwisata).
- 4) Aspek infrastruktur (Infrastruktur menuju objek wisata yang banyak rusak menjadi kendala dalam aksesibilitas menuju destinasi wisata).
- 5) Aspek kebijakan pemerintah (Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata mengindikasikan bahwa kebijakan dan program pemerintah belum sepenuhnya mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Grobogan).

Penyelenggaraan tata kelola wisata tidak bisa diharapkan hanya dari partisipasi masyarakat saja. Ada partisipan lain yang juga perlu turut memperhatikan perkembangan wisata, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta. Agar inovasi, kreativitas dan berkelanjutan pada desa wisata, maka para stakeholder harus saling bersinergi. Jadi tujuan penelitian ini adalah menemukan titik temu yang lebih kreatif lagi, misalnya para pemangku

kepentingan melaksanakan berbagai upaya seperti sosialisasi yang lebih aktif lagi kepada masyarakat mengenai objek wisata, mencari investor lagi sehingga wisata di Kabupaten Grobogan bisa bertahan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan penelitian pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu sebagai daerah wisata adalah:

1. Bagaimanakah kolaborasi yang terjadi dalam pengembangan wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan?
2. Apa saja faktor penghambat dalam mewujudkan kolaborasi pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian pengembangan wisata Bledug Kuwu sebagai daerah wisata, adalah:

1. Menganalisis kolaborasi Governance, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan.
2. Mengidentifikasi penghambat dalam mewujudkan kolaborasi pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian pengembangan wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan sebagai daerah wisata, ini yaitu:

1. Bagi penulis penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang pengelolaan pariwisata daerah.

2. Bagi pemerintah manfaat yang diharapkan yaitu pemerintah dapat dijadikan sebagai informasi atau masukan yang positif dalam pengelolaan aset wisata yang terdapat di daerahnya.
3. Bagi dunia akademis diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengembangan organisasi dan pengelolaan aset wisata, khususnya untuk program studi Administrasi Publik.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1. Adminitrasi Publik

Administrasi merupakan usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam arti sempit, administrasi mencakup aktivitas seperti pencatatan, surat-menysurat, pembukuan sederhana, pengetikan, dan kegiatan teknis ketatausahaan lainnya. Sedangkan dalam arti luas, administrasi mencakup seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam upaya mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Menurut The Liang Gie, sebagaimana dikutip oleh Syafiie (2000:14), administrasi adalah "serangkaian pengaturan terhadap pekerjaan utama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu."

1.6.2. Paradigma Administrasi Publik

Tahapan paradigma administrasi publik meliputi berbagai periode perkembangan teori dan praktiknya. Paradigma pertama, yakni Dikotomi Politik-Administrasi Publik (1900-1926), yang dipelopori oleh Leonard D. White, menekankan adanya dua fungsi dalam administrasi publik:

politik dan administrasi, dengan administrasi bekerja setelah politik merumuskan kebijakan. Paradigma kedua, Prinsip-prinsip Administrasi Publik (1927-1937), yang dipelopori oleh FW. Taylor, fokus pada penerapan prinsip administrasi seperti efisiensi, efektivitas, dan koordinasi. Paradigma ketiga, Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970), yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard dan rekan-rekannya, melihat administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik dan dipengaruhi oleh nilai-nilai eksternal. Paradigma keempat, Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970), di bawah pimpinan Herbert Simon dan koleganya, mengembalikan administrasi publik ke ranah ilmu administrasi dengan fokus pada teori organisasi dan manajemen. Paradigma kelima, Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang), yang dipelopori oleh Amitai Etzioni dan Gerald Caiden, menekankan pada penerapan prinsip dan fungsi administrasi publik menggunakan teori organisasi dan manajemen publik. Paradigma Old Public Administration (OPA), dipelopori oleh FW. Taylor dan Henry Fayol, dikenal sebagai administrasi publik klasik yang fokus pada efisiensi dan produktivitas. Paradigma New Public Administration (NPA) muncul pada 1960-1970 sebagai perubahan dari OPA, mengutamakan keadilan sosial dan penghargaan terhadap martabat manusia. Paradigma New Public Management (NPM), yang diperkenalkan pada 1992 oleh Osborne dan Gaebler, menekankan pada prinsip entrepreneurial governance. Paradigma terakhir, New Public

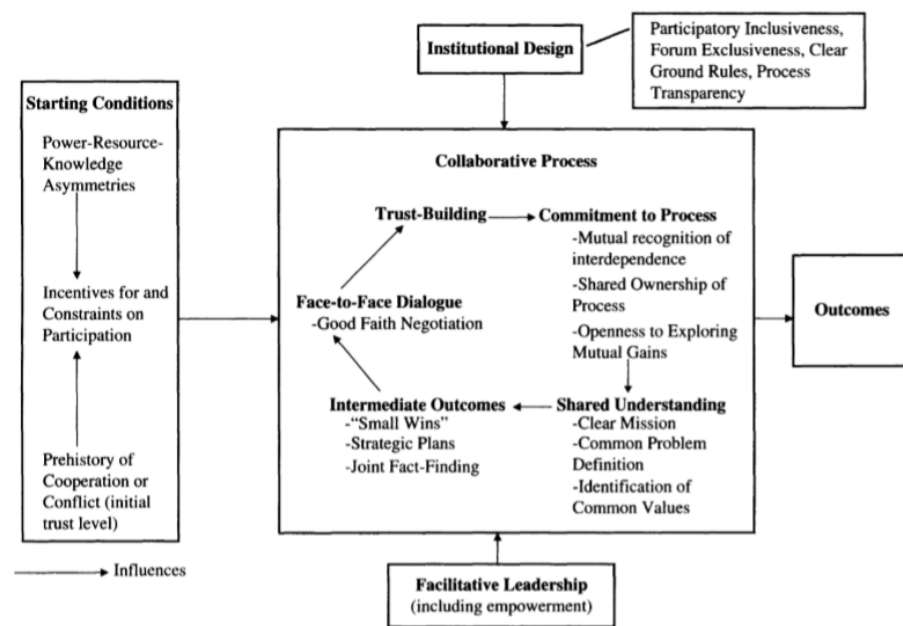
Service (NPS), muncul sebagai tanggapan terhadap NPM, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan birokrasi.

Dalam paradigma NPS, salah satu caranya adalah melalui collaborative governance, di mana proses pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan melibatkan berbagai pihak secara konstruktif, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil (civil society). Collaborative governance memungkinkan partisipasi masyarakat dan kerjasama lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, collaborative governance menjadi salah satu pendekatan dalam paradigma administrasi publik kontemporer (NPS) yang menekankan pada pelibatan multi-pihak, transparansi, dan akuntabilitas.

1.6.3. Collaborative Governance

Gagasan tentang collaborative governance umumnya merujuk pada sekelompok pemangku kepentingan yang saling bergantung, seringkali dari berbagai sektor, yang bekerja sama untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan guna mengatasi masalah atau situasi kompleks dan beragam (Choi dan Robertson, 2018). Penerapan prinsip kolaborasi pada tingkat pemerintahan lokal sering dianggap sebagai solusi terbaik ketika pemerintah daerah menghadapi tantangan yang semakin rumit. Selain itu, kemitraan antara sektor publik dan swasta, peran penting lembaga non-pemerintah, serta semangat sukarela di kalangan masyarakat, mendukung pertumbuhan proses

kolaborasi dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan tersebut. Doberstain (2016) menambahkan bahwa alasan di balik penerapan collaborative governance adalah untuk mengharapkan bahwa pegawai negeri dan aktor masyarakat sipil mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai masalah kebijakan dan solusinya, sehingga keputusan yang dihasilkan dari pemerintahan kolaboratif bisa berbeda dari keputusan yang diambil dalam sistem birokrasi tradisional yang tidak melibatkan masyarakat sipil.



Gambar 1.3 Model Kerangka Kerja Proses Collaborative Governance

DeSeve (dalam Sudarmo, 2018:114) menyarankan kriteria menilai keberhasilan kolaborasi dalam sebuah program melalui berbagai dimensi collaborative governance. Pertama, tipe struktur jaringan menjelaskan bagaimana elemen-elemen dalam jaringan saling terkait dan berfungsi, seperti struktur clusture dan spoke. Kedua, komitmen terhadap tujuan

menggarisbawahi pentingnya perhatian dan dedikasi terhadap tujuan bersama yang diartikulasikan dalam misi organisasi. Ketiga, adanya saling percaya di antara para peserta jaringan penting untuk memastikan komunikasi dan usaha bersama yang efektif. Keempat, governance mencakup kepercayaan antara pihak-pihak terlibat, batasan partisipasi, aturan yang telah disepakati, dan kebebasan dalam menentukan cara kolaborasi. Kelima, akses kekuasaan menilai keberhasilan berdasarkan prosedur yang jelas dan diterima secara luas, serta otoritas untuk mengimplementasikan keputusan. Keenam, pembagian akuntabilitas dan tanggung jawab melibatkan pengelolaan bersama oleh stakeholder dan pertanggungjawaban terhadap hasil yang dicapai. Ketujuh, berbagi informasi mencakup akses yang adil dan aman bagi anggota jaringan, serta kemudahan dalam sistem dan prosedur informasi. Terakhir adalah evaluasi ketersediaan sumber daya merupakan aspek penting. Ini mencakup penilaian seberapa mudah diperolehnya berbagai jenis sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya tersebut meliputi kekayaan alam, tenaga kerja, kepakaran teknis, serta modal finansial.

Berdasarkan delapan kriteria keberhasilan collaborative governance menurut DeSeve, beberapa isu yang menarik untuk diteliti dalam pengembangan objek wisata adalah sebagai berikut: Pertama, komitmen terhadap tujuan menunjukkan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pengembangan objek wisata, yang

mengindikasikan kemungkinan kurangnya komitmen bersama untuk mengembangkan pariwisata. Kedua, adanya saling percaya di antara para pelaku terhambat oleh minimnya kelompok sadar wisata, mencerminkan belum terbangunnya kepercayaan pelaku wisata. Ketiga, governance menjadi masalah karena kurangnya sosialisasi tentang objek wisata, yang menunjukkan belum adanya aturan dan mekanisme yang jelas dalam mengoordinasikan pengembangan pariwisata. Keempat, akses terhadap kekuasaan terbatas oleh keterbatasan anggaran dan minimnya investasi pada objek wisata, menandakan belum adanya otoritas yang jelas dalam pengalokasian sumber daya untuk sektor ini. Terakhir, akses terhadap sumber daya terhambat oleh kekurangan anggaran, modal, dan sarana-prasarana, yang jelas mengindikasikan bahwa akses terhadap sumber daya merupakan kendala dalam pengembangan pariwisata. Kelima masalah ini menjadi fokus yang signifikan untuk penelitian lebih lanjut mengenai collaborative governance wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan.

Ketergantungan berlebihan pada prosedur seringkali menghambat kolaborasi dan tidak mendukung peningkatan kualitas kerjasama. Ketika prosedur menjadi terlalu kaku dan risiko tidak diambil, efektivitas kolaborasi dapat terancam. Masalah ini sering timbul ketika pemerintah masih mempertahankan pendekatan top-down dalam kolaborasi, mendominasi proses, dan tidak menjalankan kesepakatan dengan mentalitas kerja sama yang egaliter. Kegagalan kolaborasi juga dapat

disebabkan oleh pandangan yang menilai partisipasi kelompok kepentingan sebagai hal yang kurang penting, serta dominasi kelompok tertentu atau pihak pemerintah. Selain itu, strategi kooptasi.

1.6.4. Pariwisata

Lokus penelitian pengembangan wisata di Kabupaten Grobogan termasuk dalam paradigma Paradigma New Public Service (NPS). Menurut Anggraini Alamsyah (2016) Paradigma New Public Administration bertujuan untuk memberikan keadilan, kesamaan, dan hukum di masyarakat, serta untuk menengahkan harmoni dan integrasi di masyarakat. Prinsip pelayanan desa wisata menjadi pertimbangan dalam menjalankan prinsip pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Tujuan dari paradigma New Public Service yakni mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas.

Saat ini, pariwisata merupakan komoditas ekonomi yang semakin berkembang. Dalam teori ekonomi, daya saing pariwisata seringkali dievaluasi dari perspektif permintaan. Faktor-faktor seperti pendapatan, populasi negara pengunjung, biaya hidup, biaya transportasi antar negara, nilai tukar, dan inflasi mempengaruhi keputusan wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Untuk menciptakan keunggulan komparatif, sektor pariwisata perlu beralih dari fokus pada permintaan menjadi penawaran. Destinasi wisata yang populer sering kali disebabkan oleh kondisi lingkungan, infrastruktur, dan nilai budaya yang ada, seperti dijelaskan Murphy (dalam Tjahjadi Michael dkk., 2018).

1.6.5. Penelitian Terdahulu

No (1)	Peneliti (2)	Judul (3)	Tujuan (4)	Hasil (5)
1.	R. Rindu Garvera (2021)	Collaborative governance dalam mewujudkan desa Mandiri .	Studi ini memiliki beberapa sasaran utama. Pertama, mengkaji mekanisme kerja sama antar-pemangku kepentingan dalam upaya membangun keswadayaan di Desa Bojongmengger. Kedua, mengidentifikasi elemen-elemen yang mendorong keberhasilan implementasi tata kelola kolaboratif di lokasi tersebut. Ketiga, menelaah berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan model pengelolaan bersama di wilayah desa ini. Dengan demikian, penelitian bertujuan memperoleh pemahaman holistic tentang perubahan kerjasama dalam konteks menumbuhkembangkan desa mandiri di Bojongmengger.	Penemuan studi mengindikasikan bahwa penerapan tata kelola kolaboratif untuk mencapai swadaya desa belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Beberapa aspek positif yang menunjang implementasi kerja sama multipihak di Desa Bojongmengger mencakup ketersediaan aset berupa sumber daya manusia dan finansial, serta adanya legitimasi kewenangan. Namun demikian, terdapat tiga tantangan utama yang menghalangi kelancaran proses kolaborasi, yaitu: 1) minimnya dedikasi dari pihak-pihak terkait, 2) terbatasnya akses dan penyebaran informasi, serta 3) struktur organisasi yang masih cenderung bersifat top-down dan didominasi oleh pihak tertentu.
2.	Nasrulhaq (2020)	Analisis Strategi Pengembangan Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk	Kajian ini berupaya mengeksplorasi pendekatan yang diterapkan oleh instansi pemerintah bidang kebudayaan dan kepariwisataan dalam mengembangkan	Temuan studi mengungkapkan bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki kekayaan potensi wisata yang beragam. Namun, Dinas Pariwisata setempat

No (1)	Peneliti (2)	Judul (3)	Tujuan (4)	Hasil (5)
			sektor wisata di wilayah setempat. Selain itu, studi ini juga bertujuan mengidentifikasi elemen-elemen yang mendukung serta menghambat upaya peningkatan destinasi wisata di Kabupaten Nganjuk. Meskipun daerah ini memiliki beragam aset wisata yang menjanjikan, badan kepariwisataan setempat masih menghadapi kendala dalam memaksimalkan potensi tersebut. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan anggaran, padahal cakupan pengembangan yang dibutuhkan cukup luas. Lebih lanjut, belum adanya regulasi daerah yang secara spesifik mengatur strategi pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Nganjuk turut menjadi hambatan dalam proses ini.	menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pengembangan aset-aset tersebut. Kendala utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya finansial, sementara skala pengembangan yang diperlukan cukup ekstensif. Selain itu, belum tersedianya landasan hukum berupa peraturan daerah yang secara khusus mengatur strategi pengembangan industri pariwisata di wilayah ini turut menjadi faktor penghambat. Situasi ini mengakibatkan terhambatnya upaya pemanfaatan optimal potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Nganjuk.
3.	Robeth Akbar (2022)	Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang	Studi ini mengadopsi metode penelitian deskriptif dengan orientasi kualitatif. Proses pengumpulan informasi melibatkan dua jenis data: pertama, data primer yang diperoleh melalui wawancara	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa proses kolaborasi dimulai dari face to face dialogue atau komunikasi intensif antar aktor. Selain itu, faktor starting conditions, institutional design,

No (1)	Peneliti (2)	Judul (3)	Tujuan (4)	Hasil (5)
			mendalam; kedua, data sekunder yang mencakup aspek-aspek tujuan, kebijakan, serta program terkait. Analisis terhadap kedua jenis data ini bertujuan untuk menghasilkan rumusan strategi yang komprehensif, dengan merujuk pada berbagai konseptualisasi strategi yang ada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti, serta menghasilkan temuan yang kaya akan nuansa dan kompleksitas situasi di lapangan.	dan facilitative leadership menjadi faktor pendukung dalam kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Gubugklakah
4.	Hugo Hamar (2020)	Strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja	Mengetahui strategi yang telah direncanakan dan dilakukan oleh dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tujuh strategi, yaitu: a. Strategi dasar yang memiliki banyak efek atau berbagai efek; b. Strategi yang berkaitan dengan pengelolaan interest pariwisata; c. Strategi pengembangan dan keterkaitan produk; d. Strategi pemasaran yang diperkuat; e. Strategi pengembangan sumber daya manusia; f. Strategi distribusi pariwisata spasial; dan g.

No (1)	Peneliti (2)	Judul (3)	Tujuan (4)	Hasil (5)
				Strategi pengembangan bidang distribusi pariwisata..
5.	Marwan (2018)	Studi Ekonomi Politik: pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi	Studi ini berupaya memperdalam pemahaman tentang dinamika ekonomi politik dalam konteks manajemen sektor pariwisata. Secara spesifik, kajian ini menitikberatkan pada analisis transformasi ekonomi yang terjadi di tingkat komunitas pedesaan seiring dengan kemunculan destinasi wisata baru di wilayah tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada eksplorasi dampak hadirnya objek wisata terhadap perkembangan struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengungkap interaksi kompleks antara kebijakan pengembangan pariwisata, perubahan sosial-ekonomi, dan pemberdayaan komunitas lokal dalam konteks pembangunan desa..	Menggambarkan bagaimana pemerintah Wakatobi menangani pariwisata, menampilkan kekayaan alam Wakatobi, dan bagaimana upaya dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan melindungi ekosistem melalui Taman Nasional Wakatobi.
6.	Okta Zahara (2018),	Analisis Pengelolaan Objek Wisata Kebun Binatang Kasang Kulim di Kecamatan Siak	Tujuan peneliti ingin bagaimana pengelolaan pariwisata yang sama-sama tidak terlepas dari	Hasil penelitian menunjukkan pengukuran seperti pengembangan, kelembagaan, dan pengaturan. Hasil

No (1)	Peneliti (2)	Judul (3)	Tujuan (4)	Hasil (5)
		Hulu Kabupaten Kampar	peranan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya.	rekapitulasi nilai untuk masing-masing indikator menunjukkan bahwa pengelolaan kebun binatang kasang kulim berada di kelas yang cukup baik dengan kisaran nilai persentase 36,84%. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan kebun binatang kasang kulim tidak akan kehilangan peran yang dimainkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat
7.	Ardhia Mafaza (2020)	Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya proses collaborative governance dalam Program Balai Ekonomi Desa (Balkondes) di Desa Borobudur Kabupaten Magelang.	Hasil penelitian menunjukan bahwa collaborative governance diantara para stakeholder dalam Program Balai Ekonomi Desa (Balkondes) di Desa Borobudur Kabupaten Magelang sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan para stakeholder sudah menjalankan tugas pokoknya secara maksimal berdasarkan 8 indikator kolaborasi dari De seve. Hanya saja terkait entitas administratif dalam perjanjian kerjasama hanya mengatur antara PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (PT. TWC) selaku BUMN pendamping dan

No (1)	Peneliti (2)	Judul (3)	Tujuan (4)	Hasil (5)
				sponsor, dan Pemerintah Desa Borobudur melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), belum menjelaskan terkait keterlibatan PT. Manajemen CBT Nusantara (PT. MCN) yang sekarang selaku pengelola Program Balkondes. Sehingga boundary dan exclusivity dalam governance belum menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi.
8.	Hastuti dkk. (2019)	Model pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal sebagai strategi pengentasan kemiskinan di lereng merapi kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	Tujuan penelitian ini adalah penelitian mengetahui tentang model pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal sebagai strategi pengentasan kemiskinan di lereng merapi kab. Sleman Daerah Jogjakarta	Penelitian menemukan tiga desa wisata wisata dikategorikan: Petingsari sebagai desa wisata alam, Srowolan sebagai desa yang wisata budaya, dan Brayut sebagai desa wisata alami dan budayanya. Pengembangan tiga desa wisata tersebut, disarankan bahwa pemerintah membuat rencana sinergi, mempertimbangkan peluang perpecahan kepentingan yang mungkin terjadi antar desa, membuat perda tentang penyelenggaraan desa wisata, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa desa harus mempertahankan kualitas lingkungannya

No (1)	Peneliti (2)	Judul (3)	Tujuan (4)	Hasil (5)
				setelah menjadi desa wisata.
9.	Hamim Farhan & R. Nazriah (2019)	Pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal-budaya religi sebagai upaya pendukung peningkatan industri pariwisata daerah Gresik	Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata Gresik, pengembangan pariwisata yang didasarkan pada budaya dan agama lokal	Interaksi bisnis, politik, dan kultural adalah tiga komponen yang membentuk pemetaan pariwisata secara sosiologis, menurut temuannya. Namun, konsep pengembangan harus berbasis masyarakat, yang berarti masyarakat harus terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan wisata budaya.
10.	Zahratul Aeni (2019)	Collaborative governance dalam pengelolaan Kepariwisata yang berkelanjutan	Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi sinergisitas pemerintah dan pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pelaksanaan rencana strategis pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pati. Bank Bank BRI sebagai salah satu BUMN yang memiliki kewajiban untuk turut serta melaksanakan program pemerintah menurut amanat Undang-Undang Republik Indonesia	Hasil penelitiannya adalah Dalam hal pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pati yakni kurang aktifnya inisiasi dari pemerintah daerah sendiri dalam menggali potensi wisata di Kabupaten Pati. Di samping itu, permasalahan pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati terletak pada kurang jelasnya sasaran dan target terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati. Sasaran menggambarkan tujuan yang akan dicapai dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi, perusahaan atau individu.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa dalam penelitian mengenai *collaborative governance* yang dilakukan sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari peneliti lain mengenai *Collaborative Governance*. Sebagian besar peneliti dengan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya pada teori yang digunakan dalam penelitian yang peneliti laksanakan dan lokusnya yang diamati dalam penelitian yang dilaksanakan ini juga berbeda.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1 *Collaborative Governance*

Collaborative governance dalam pengembangan obyek wisata merupakan sebuah upaya pengendalian yang dilaksanakan guna mengembangkan potensi wisata sehingga lebih menarik dan banyak wisatawan berkunjung. Adapun peneliti untuk menganalisis *Collaborative governance* dalam pengembangan wisata di Kabupaten Grobogan, peneliti menitik beratkan kepada teori *Collaborative governance Ansell dan Gash* (dalam Tjhaya Supriatna, 2021:144) yang didasarkan pada pendekatan 4 komponen collaborative, yakni:

1. Kondisi Awal

Kondisi awal dalam pengelolaan destinasi wisata meliputi pemetaan potensi wisata yang ada di wilayah tersebut, seperti sumber daya alam, budaya, serta keterlibatan masyarakat lokal. Kondisi ini akan menentukan langkah-langkah pengembangan yang harus dilakukan (Prasetyo, 2017). Kondisi awal memberikan pengaruh

sebelum proses kolaborasi terjadi, hal tersebut dapat diketahui apakah terdapat factor penghambat ataupun pendukung antara pemangku kepentingan. Di dalam menganalisis kondisi awal *Collaborative governance* dalam pengembangan wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan, fenomena yang diamati yaitu: (a) Sumber daya yang ada dan (b) Pengetahuan pemangku kepentingan.

Salah satu tempat wisata unik di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, adalah Beledug Kuwu, yang menyajikan fenomena alam langka berupa letupan lumpur. Letupan lumpur di kawasan ini terjadi secara alami dengan ketinggian hingga 8 meter. Lumpur tersebut mengandung senyawa garam dan belerang. Keunikan alam ini menjadikan Bledug Kuwu memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata geologi, ekowisata, sekaligus wisata edukasi.

Pemangku kepentingan dalam pengelolaan wisata Bledug Kuwu meliputi pemerintah daerah, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan wisatawan. Kapasitas pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal, dalam mengelola wisata ini masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat lokal belum memahami sepenuhnya bagaimana mengelola dan mengembangkan destinasi wisata secara profesional, misalnya dalam hal manajemen wisata, pemasaran, pengemasan produk lokal, serta pelestarian lingkungan.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan dalam pengelolaan objek wisata merujuk pada struktur dan mekanisme organisasi yang dibentuk untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan destinasi wisata secara efektif dan berkelanjutan. Desain ini mencakup pembagian peran, tanggung jawab, serta interaksi antara berbagai para pemangku berkepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat setempat, pengusaha, dan organisasi NGO. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan destinasi wisata dapat berjalan dengan baik, memenuhi standar kualitas, dan memberi keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang optimal untuk semua pihak yang terlibat (Sari & Suryani, 2020).

Bledug Kuwu sebagai objek wisata di Kabupaten Grobogan memiliki desain kelembagaan yang melibatkan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta masyarakat lokal. Sistem pemberdayaan dalam pengelolaan wisata ini bertumpu pada pelibatan aktif masyarakat lokal melalui Pokdarwis dan BUMDes untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam manajemen wisata, penyediaan layanan, dan promosi destinasi. Pembagian hasil dari pendapatan wisata biasanya dilakukan secara proporsional, di mana sebagian besar dialokasikan untuk pengelolaan fasilitas wisata, pembayaran honor pengelola, dan kontribusi ke kas desa untuk mendukung pembangunan setempat.

Prosedur pengelolaannya melibatkan koordinasi antar-lembaga, di mana BUMDes sering bertanggung jawab atas operasional harian seperti penjualan tiket, perawatan fasilitas, dan pengelolaan keuangan, sementara Pokdarwis fokus pada promosi, kegiatan edukasi, dan pelestarian lingkungan.

Elemen penting dalam *collaborative governance* yaitu kegiatan evaluasi sering kali terabaikan akibat kurangnya sistem evaluasi yang komprehensif, objektif, dan diterima oleh semua pihak. Tantangan utama meliputi penentuan indikator kinerja yang relevan, metode pengumpulan data yang efektif, serta mekanisme umpan balik yang konstruktif. Selain itu, budaya organisasi yang mendukung evaluasi dan pembelajaran masih menjadi kendala, karena temuan evaluasi sering kali tidak digunakan secara optimal untuk perbaikan dan pengembangan strategi. Ego sektoral juga menjadi hambatan signifikan, yang muncul dari ketakutan akan hilangnya otonomi, kebiasaan bekerja dalam silo, atau minimnya pemahaman tentang nilai kolaborasi. Mengatasi ego sektoral memerlukan transformasi mindset, budaya kerja, dan struktur organisasi. Di sisi lain, kurangnya keselarasan program antara pihak-pihak yang terlibat sering kali disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif, perbedaan prioritas, atau kurangnya pemahaman terhadap kompleksitas ekosistem pariwisata secara keseluruhan. Untuk mencapai kesuksesan dalam *collaborative governance*, khususnya dalam pengembangan

pariwisata di Kabupaten Grobogan, diperlukan komitmen jangka panjang, kepemimpinan yang visioner, serta kesediaan semua pihak untuk terus belajar dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan secara holistik dan berkelanjutan.

Namun, pengelolaan Bledug Kuwu tidak lepas dari sejumlah hambatan. Salah satunya adalah koordinasi yang kurang optimal antara pemerintah daerah, BUMDes, dan Pokdarwis, yang sering menyebabkan tumpang tindih peran. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya pelatihan teknis bagi masyarakat lokal menghambat optimalisasi pemberdayaan. Promosi destinasi juga masih terbatas karena minimnya pemanfaatan teknologi digital, sehingga daya tarik wisata ini belum mencapai potensi maksimalnya.

Perbedaan sudut pandang antar pemangku kepentingan juga menjadi hambatan utama dalam mencapai kesepakatan bersama, karena setiap pihak mengutamakan prioritas masing-masing, seperti pemerintah fokus pada pendapatan daerah, masyarakat pada kesejahteraan dan budaya, serta pelaku usaha pada profit. Kurangnya pemahaman tentang prinsip dan manfaat collaborative governance, seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, kerangka hukum daerah yang kurang mendukung fleksibilitas pendekatan kolaboratif menjadi hambatan tambahan. Untuk mengatasinya, diperlukan transformasi mindset, reformasi regulasi, serta pendekatan inklusif dan berorientasi pada kepentingan Bersama.

3. Kepemimpinan Fasilitasi

Kepemimpinan menjadi sebuah komponen yang sangat penting dalam *Collaborative governance*, karena dalam berkolaborasi sangat mungkin terjadi suatu problem dan konflik antara pemangku kepentingan. Adapun kepemimpinan dikatakan berhasil apabila para pemangku kepentingan memiliki rasa saling percaya, sehingga akan menunjukkan suatu keberhasilan dalam proses kolaborasi tersebut. Di dalam menganalisis kepemimpinan fasilitas *Collaborative governance* dalam pengembangan wisata di Kabupaten Grobogan, fenomena yang diamati yaitu: (a) Proses musyawarah para pemangku kepentingan dan pelaku, (b) Kebijakan partisipasi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kolaborasi.

Proses musyawarah para pemangku kepentingan dan pelaku melibatkan pemerintah, BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat lokal untuk membahas pembagian peran, pengelolaan pendapatan, serta pelestarian lingkungan. Pemerintah desa atau BUMDes memimpin sebagai fasilitator untuk menciptakan diskusi inklusif dan kolaboratif. Sedangkan Kebijakan partisipasi para pemangku kepentingan mendorong keterlibatan masyarakat melalui BUMDes, Pokdarwis, dan peran langsung seperti penyediaan jasa atau produk lokal. Kolaborasi difokuskan pada pembagian tugas: BUMDes mengelola administrasi, Pokdarwis mempromosikan destinasi, dan masyarakat memberikan layanan wisata.

4. Proses Kolaborasi

Dalam pengelolaan objek wisata, proses kolaborasi adalah proses di mana berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, bisnis, dan organisasi non-pemerintah, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Proses ini melibatkan komunikasi, koordinasi, dan komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan yang efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Agustina, 2018).

Proses kolaborasi dalam pengembangan wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan, fenomena yang diamati, yaitu: (a) dialog antar pemangku kepentingan, (b) kepercayaan pemangku kepentingan, (c) komitmen pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi, (d) pemahaman bersama antar pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi, (e) kesepakatan bersama pemangku kepentingan terhadap tujuan.

Dialog antara pemangku kepentingan dilakukan melalui forum-forum resmi seperti rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Grobogan. Misalnya, pada Januari 2023, Bappeda mengadakan rapat koordinasi lanjutan persiapan penyusunan proposal dengan tema pengembangan wisata Bledug Kuwu dan pengembangan UMKM, yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Kepercayaan antara pemangku kepentingan dibangun melalui transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan wisata. Penyusunan masterplan pengembangan Bledug Kuwu pada tahun 2022 memberikan payung hukum yang jelas, sehingga meningkatkan kepercayaan di antara para pihak. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam kelompok sadar wisata (Pokdarwis) membantu membangun kepercayaan melalui partisipasi langsung dalam kegiatan promosi dan pengelolaan wisata.

Komitmen para pemangku kepentingan tercermin dari upaya bersama dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung di kawasan Bledug Kuwu. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pariwisata, menetapkan kebijakan strategis yang mendukung partisipasi masyarakat lokal, seperti pelibatan BUMDes dan Pokdarwis dalam operasional wisata. Selain itu, masyarakat lokal menunjukkan komitmen mereka dengan menyediakan layanan pendukung, seperti makanan, minuman, dan kerajinan khas daerah, yang meningkatkan daya tarik wisata Bledug Kuwu.

Pemahaman bersama dicapai melalui penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2025 menetapkan Bledug Kuwu sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas. Dokumen ini menjadi acuan

bersama dalam pengembangan wisata, memastikan semua pihak memiliki visi dan tujuan yang sejalan.

Kesepakatan bersama terhadap tujuan pengembangan wisata Bledug Kuwu diwujudkan melalui penetapan citra pariwisata daerah, seperti "*Miracle of Java*," yang mencerminkan keunikan dan daya tarik Bledug Kuwu. Selain itu, adanya masterplan pengembangan Bledug Kuwu memberikan arah yang jelas bagi semua pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan daya tarik wisata, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Dengan dialog yang intensif, kepercayaan yang terbangun, komitmen yang kuat, pemahaman bersama, dan kesepakatan terhadap tujuan, proses kolaborasi dalam pengelolaan wisata Bledug Kuwu dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, memberikan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat.

1.6.2 Faktor penghambat dalam *collaborative governance*

Mengetahui faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Faktor penghambat tersebut dapat mengurangi daya tarik dan potensi wisata. Dengan mengetahui hambatan-hambatan ini, pemangku kepentingan di obyek wisata Bledug Kuwu dapat merancang solusi yang tepat, meningkatkan kolaborasi antar pihak terkait, dan memastikan pengembangan yang berkelanjutan. Hal ini juga membantu untuk menghindari dampak negatif terhadap destinasi wisata,

meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan mempercepat pencapaian tujuan pengembangan wisata.

Teori tentang faktor penghambat *Collaborative Governance* disampaikan oleh Mattessich & Monsey (1992) yang meliputi:

1. Anggaran yang Kurang. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu hambatan utama dalam pengembangan pariwisata. Tanpa cukup dana, proyek-proyek pengembangan pariwisata tidak bisa dilaksanakan secara efektif.
2. CSR yang Minimal. Kurangnya Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pariwisata juga menjadi hambatan. Perusahaan yang tidak peduli dengan dampak sosial dan lingkungan cenderung tidak mau berinvestasi dalam proyek-proyek yang positif.
3. Perhatian Pemerintah yang Kurang. Kurangnya perhatian pemerintah dalam mengembangkan pariwisata juga merupakan hambatan. Pemerintah yang tidak aktif dalam mendukung dan mengarahkan proyek-parowisata akan membuat jalurnya lambat dan tidak stabil.
4. Promosi yang Kurang. Kurangnya promosi juga menjadi hambatan besar. Jika tidak ada kampanye yang efektif untuk mempromosikan destinasi wisata, maka wisatawan tidak akan mengetahuinya dan tidak akan datang.

Menurut Sukardi (2015), beberapa faktor penghambat yang signifikan dalam pengembangan pariwisata, antara lain: (1) Infrastruktur yang Kurang Memadai: Banyak objek wisata yang tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti akses jalan yang belum diperbaiki dan fasilitas Bersama yang minim. (2) Kualitas Produk Wisata yang Rendah: Produk wisata yang ditawarkan sering kali tidak memenuhi standar kualitas, sehingga kurang menarik bagi wisatawan. (3) Kurangnya Promosi: Upaya promosi yang tidak maksimal membuat banyak orang tidak mengetahui keberadaan objek wisata, sehingga mengurangi jumlah pengunjung. (4) Minimnya Anggaran: Keterbatasan dana dari pemerintah daerah menjadi kendala dalam melaksanakan program-program pengembangan pariwisata. (5) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Jumlah SDM yang terlatih dan berkualitas masih rendah, sehingga berdampak pada pelayanan dan pengelolaan objek wisata. (6) Kesadaran Masyarakat yang Rendah: Masyarakat lokal sering kali kurang menyadari pentingnya pelestarian lingkungan dan potensi ekonomi dari pariwisata, sehingga keterlibatan mereka dalam pengembangan pariwisata menjadi minim.

Menurut Primadany, et al (2017) faktor-faktor penghambat pengembangan pariwisata daerah meliputi: (1) keterbatasan dana, (2) lokasi objek wisata yang kurang strategis, dan (3) kurangnya promosi pasar pariwisata. Sedangkan menurut Budiani, et al (2018), faktor-faktor penghambat pengembangan pariwisata meliputi (1) keterbatasan dana,

(2) kurangnya fasilitas pendukung, dan (3) kurangnya promosi yang efektif. Berbeda dari pendapat keduanya, Ariyanto (2020), perusahaan-perusahaan-perusahaan besar dapat berperan penting dalam pengembangan objek wisata dengan memberikan dukungan finansial melalui CSR.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, maka yang penulis jadikan acuan dalam operasionalisasi konsep factor-faktor penghambat collaborative governance dalam penelitian ini, yaitu: (1) anggaran yang kurang, (2) CSR yang minimal, (3) Kurangnya promosi, dan (4) Kurangnya perhatian pemerintah

1.7. Argumen Penelitian

Collaborative Governance dalam project pengembangan desa wisata, sebagai upaya pemberdayaan *stakeholder* lokal menggunakan strategi *Community Development*. *Collaborative Governance* dalam membangun *Community Development* dengan para *stakeholder* terkait, kemudian membentuk program-program untuk mengembangkan desa sebagai desa tujuan wisata diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup yang ada di daerah wisata Kabupaten Grobogan. Dalam *Collaborative Governance*, para *stakeholder* menyusun perencanaan-perencanaan dan tujuan pengembangan wisata daerah yang kemudian diimplementasikan bersama-sama mewujudkan tujuan pengembangan wisata.

Secara umum, *Collaborative Governance* dirancang dengan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang menghambat suatu pekerjaan. Proses ini

melibatkan organisasi yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Namun, tidak ada informasi rinci mengenai jenis organisasi yang terlibat dalam kegiatan ini. Kerja sama antar organisasi hanya terlihat pada kesepakatan tujuan bersama dan implementasi kemampuan masing-masing kelompok (Kurdi, Hartman et al. dalam Mah and Hills, dikutip Sirajuddin Saleh, 2018: 112).

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah yang mengumpulkan data untuk tujuan penelitian. Ini juga mencakup analisis teoritis tentang metode atau teknik yang digunakan. Penelitian juga merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu topik dan merupakan suatu proses sistematis untuk menyelidiki permasalahan tertentu yang perlu dijawab. Hakikat penelitian dapat dipahami dari berbagai faktor yang memotivasi penelitian dan dipengaruhi oleh motivasi dan tujuan individu. Secara umum motivasi dan tujuan penelitian adalah sama, yaitu mencerminkan kebutuhan manusia untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan merupakan keinginan mendasar yang mendorong manusia untuk melakukan penelitian. Ada beberapa metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yang akan dijelaskan di bawah ini..

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian menentukan kategori penelitian yang akan dilaksanakan. Berdasarkan metode pengumpulan data, penelitian

umumnya dikategorikan menjadi kuantitatif dan kualitatif. Menurut Vigih Kristanto (2018:14), sering diterapkan dalam ilmu sosial dengan analisis yang bergantung pada ketajaman penilaian peneliti. Data dikumpulkan melalui teknik gabungan, dengan fokus pada makna dan generalisasi. Sugiyono (2018:8) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode naturalistik, berfokus pada kondisi alami. Sementara itu, Vigih Kristanto (2018:15) menggambarkan penelitian kualitatif sebagai proses berpikir induktif yang dimulai dari pengamatan dan bukan teori umum.

Dalam penelitian ini metode yang dipilih adalah kualitatif karena tujuannya adalah untuk menggambarkan kerjasama pengembangan lokasi wisata di kawasan Grobogan melalui kata-kata atau gambar, bukan angka. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Vigih Kristanto, 2018:13), metode kualitatif menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dipilih karena tujuannya untuk mendeskripsikan aspek-aspek kerjasama dalam pengembangan kawasan di kawasan Grobogan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian yang peneliti laksanakan yakni, Wisata Daerah yang terdapat di Kabupaten Grobogan, yakni obyek wisata Bledug Kuwu.

Wisata Bledug Kuwu adalah wisata lumpur-panas yang mengandung garam.

1.8.3. Subyek Penelitian

Berdasarkan judul peneliti yang diteliti mengenai Collaborative Governance dalam pengembangan wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan, peneliti menentukan subjek penelitian terdiri dari masyarakat (wisatawan), perangkat desa/ pegawai desa, pengelola wisata, dinas pariwisata.

Dalam memutuskan proyek, peneliti telah menggunakan sampel yang terorganisir, sampel berupa sumber data dan pendapat tertentu, yaitu kelompok yang menangani suatu masalah. Dengan ini, subyek penelitian dalam penelitian yang peneliti laksanakan ini yakni, masyarakat (wisatawan), perangkat desa, pengelola wisata, dinas pariwisata, serta pemerintah daerah Kabupaten Grobogan yang mana semua itu terlibat dalam proses ini.

1.8.4. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2018), peneliti menggunakan data kualitatif, yang merupakan jenis data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya dalam bentuk kata-kata verbal atau angka. Administrasi publik, paradigma administrasi publik, pemerintahan kolaboratif, dan pariwisata adalah beberapa objek penelitian yang termasuk dalam data kualitatif penelitian ini.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data adalah asal peneliti memperoleh data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut

a. Data Primer

Data primer yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini dari hasil wawancara mendalam terhadap beberapa sumber dan observasi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder digunakan sebagai pendukung dari data primer. Sumber data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari hasil dokumentasi.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu:

a. Observasi

Sugiyono (2018: 229) menyatakan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data yang unik karena terbatas pada pengamatan manusia dan objek alam lainnya. Peneliti dapat mengamati perilaku dan maknanya melalui observasi. Untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang keadaan, penelitian ini menggunakan pengamatan langsung terhadap kondisi sarana wisata di Kabupaten Grobogan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik penting dalam pengumpulan data penelitian. Ini melibatkan komunikasi dua arah antara pewawancara dan responden untuk mendapatkan informasi terkait topik penelitian. Wawancara seringkali dilakukan secara tatap muka (face to face), di mana pewawancara mengajukan pertanyaan langsung tentang objek penelitian berdasarkan pedoman yang telah dirancang sebelumnya.

Sugiyono (2018:467), wawancara semiterstruktur melibatkan pertanyaan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur, tetapi tetap mengikuti panduan yang telah disusun. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali permasalahan secara lebih terbuka. Responden utama yang diwawancarai adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam industri pariwisata, termasuk Dinas Pariwisata Kabupaten Grobogan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Desa. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menggunakan beberapa alat seperti buku catatan untuk mencatat data, alat perekam untuk merekam percakapan (dengan izin terlebih dahulu dari responden), serta kamera untuk mendokumentasikan dan memperkuat keabsahan data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui arsip, buku, dokumen,

tulisan, angka, dan gambar, yang berupa laporan atau keterangan yang dapat memperkuat penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2018: 329). Selain itu, Mardawani (2020: 52) menjelaskan bahwa dokumentasi melibatkan pencermatan dan analisis thd dokumen yang dibikin oleh individu atau pihak lainnya sebagai bagian dari riset. Untuk mendukung dan mendukung temuan penelitian, foto peneliti dan narasumber akan diambil sebagai dokumentasi.

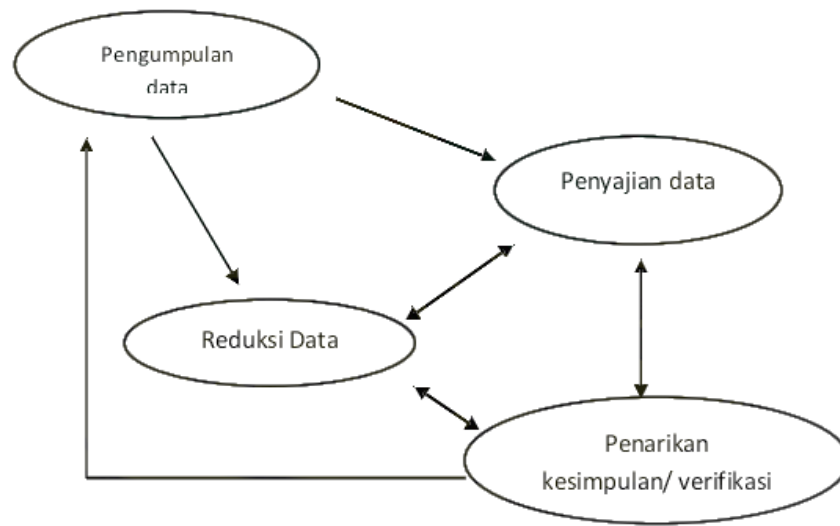
1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis mengacu pada klasifikasi atau pemeriksaan mendalam terhadap sesuatu. Dalam konteks penelitian, analisis data adalah proses pembahasan dan pemahaman data guna menemukan arti, penafsiran, dan simpulan dari semua data yang terkumpul. Analisis data juga mencakup kegiatan menjawab, mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengolah data secara sistematis dan bermakna, menurut Sirajuddin Saleh (2018:74).

Beberapa Langkah penting dalam proses analisis data, yaitu: (1) Pencarian data melalui persiapan sebelum lapangan. (2) Penataan data yang telah dikumpulkan secara sistematis. (3) Penyajian temuan yang diperoleh dari lapangan. (4) Pencarian makna secara berulang hingga tidak ada keraguan.

Penting bagi peneliti untuk meningkatkan pemahaman terhadap situasi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data melibatkan

konseptualisasi, yaitu penyusunan konsep sebelum masuk ke lapangan, diikuti dengan kategorisasi dan deskripsi selama penelitian berlangsung. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, berikut adalah ilustrasi dari proses tersebut:



Gambar 1.4 Teknik Analisis Data

Sumber : Miles dan Huberman dalam Sirajuddin Saleh, (2018:74)

Berdasarkan ilustrasi proses yang ditunjukkan, penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang berulang dan saling terkait, dari sebelum ke lapangan hingga penyelesaian laporan akhir. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum dan memilih informasi utama dari data yang diperoleh, yang seringkali melimpah. Pada tahap ini, data dicatat secara rinci, dengan pengkodean, ringkasan, dan pembagian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Proses ini berlanjut hingga laporan akhir penelitian disusun.

b. Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah visualisasi data. Penyajian data mengacu pada pengorganisasian informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan mengambil keputusan. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, grafik dan hubungan antar kategori, namun penelitian kualitatif biasanya menyajikan data dalam bentuk naratif. Tujuan visualisasi data adalah untuk memudahkan pemahaman dan merencanakan langkah selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah menentukan dan memverifikasi. Setelah mengumpulkan data, peneliti merangkum permasalahan di lapangan dan mencatat serta menganalisisnya untuk menarik kesimpulan. Perkiraan sebelumnya bersifat subyektif dan dapat berubah selama pengumpulan data. Namun kesimpulan dikatakan valid apabila didukung oleh data yang valid dan konsisten (Rajali, 2018). Dalam penelitian ini, data Dinas Pariwisata Grobogan akan dicatat, dirangkum hingga fokus pada aspek-aspek penting, kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, atau diagram alir. Keputusan akhir dan konfirmasi akan disampaikan dalam bentuk pernyataan penjelasan pariwisata di kawasan Grobogan.

1.8.8 Kualitas Data (goodness criteria)

Menurut Afiyanti & Rachmawati (2014), kualitas data atau hasil temuan suatu penelitian kualitatif ditentukan dari keabsahan data yang dihasilkan atau lebih tepatnya keterpercayaan, keautentikan dan kebenaran terhadap data, informasi, atau temuan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan. Menurut Sugiyono (2018) cara yang dapat dilakukan peneliti untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi terhadap hasil penelitiannya, antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi dan mengadakan member check.

Dalam penelitian ini, kualitas data diperoleh dari triangulasi sumber dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari tiga sumber di deskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan (member check) dengan tiga sumber tersebut.